

**DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR WILAYAH (STUDI
KASUS KABUPATEN/KOTA PROPINSI SUMATERA UTARA)**

Y. Simonsen Sianturi

Prof. Dr. H. Miyasto, SU.

ABSTRACT

Fiscal decentralization gives more advantages for regions to manage their own fiscal capacities. Regions governments have opportunity to increase economic efficiency because governments have informational advantages concerning resource allocation. The governments are in better position to provide the kind of public goods and services that closely meets the local needs.

This research aims to analyze the impact of the implementation of fiscal decentralization on regional economic growth and regional disparities in 19 regencies/cities in North Sumatera Province for a five-year implementation period, since 2004-2008. Variables studied its influence on regional economic growth is the degree of fiscal decentralization, tax ratio district, the total work force, and agglomeration level of 19 regencies/cities in North Sumatera Province. While for regions disparity the variables are examined degree of fiscal decentralization, tax ratio district, the total work force, and agglomeration level and economic growth rate of 19 regencies/cities in North Sumatera Province, using the simultaneous recursive model.

The analysis concluded that fiscal decentralization is positive effect and statistically significant amount of 365.1798 to regional economic growth in 19 regencies/cities in North Sumatera Province. Meanwhile for regions disparity, fiscal decentralization is negative effect and statistically significant amount of 284.3040 to disparities between regency/cities in North Sumatera Province. During five years of implementation of the fiscal decentralization in North Sumatera Province could be proved that the empirical, fiscal decentralization make the

economic growth of 19 regencies/cities in North Sumatera Province, increased every year, but the graphics improved of economic growth every year thus increasing regional disparities occur between regencies/cities in North Sumatera Province.

Keywords : Fiscal decentralization, Regional Economic Growth, Regional Disparities

1. PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara dengan ribuan pulau, perbedaan karakteristik wilayah adalah konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari Indonesia. Karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, sehingga pola pembangunan ekonomi di Indonesia juga tidak seragam. Ketidakteragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh, yang mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh yang berbeda ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun hasilnya, yakni pendapatan antar daerah.

Pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara sedang berkembang (NSB), tidak terkecuali di Indonesia. Karenanya, tidaklah mengherankan ketimpangan itu pastinya selalu ada, baik itu di negara miskin, negara sedang berkembang, bahkan negara maju sekalipun.

Meskipun ketimpangan itu sendiri adalah suatu yang selalu ada dalam proses pembangunan, khususnya pada tahap-tahap awal pembangunan, namun ketimpangan yang semakin melebar harus dihindari. Ketimpangan yang semakin lebar akan melahirkan berbagai ketidakpuasan, yang jika terus terakumulasi dapat menimbulkan keresahan yang berujung pada berbagai macam konflik. Konflik itu bisa terjadi antar masyarakat, antar daerah, atau masyarakat dengan pemerintah maupun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, proses pembangunan dilaksanakan secara sentralistik. Pemerintah pusat menempatkan dirinya sebagai penggerak utama dalam upaya akselerasi pembangunan diseluruh pelosok tanah air. Berbagai kebijakan pembangunan diputuskan secara terpusat dengan instrumen utamanya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Sentralisasi berbagai keputusan pada pemerintah pusat semakin memperbesar inefisiensi, karena banyak proyek-proyek yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh daerah. Studi yang dilakukan Kenneth Davey (1989) terhadap pemerintahan Indonesia menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan kenapa pemerintah Indonesia cenderung bersifat sentralistik dalam menjalankan proses pembangunannya. Pertama, kekhawatiran mengenai persatuan nasional dan kekhawatiran mengenai kekuatan-kekuatan memecah yang mau tidak mau muncul dari keadaan yang kurang stabil di awal kemerdekaan. Kedua, masalah memelihara keseimbangan politik dan keadilan dalam pembagian sumberdaya antar daerah. Ketiga, pemerintah pusat ingin memegang kendali yang erat atas kebijaksanaan pembangunan ekonomi. Sejak runtuhnya masa orde baru, semangat untuk otonomi daerah dan desentralisasi kembali menguat, terlebih untuk daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alamnya. Hal ini banyak dilakukan dengan tuntutan untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Timor-Timur, Aceh dan Papua.

Untuk menjaga integrasi nasional terhadap kondisi ini serta menjawab atas tuntutan masyarakat daerah, maka pada masa pemerintahan Habibie dikeluarkanlah satu paket kebijakan tentang Otonomi Daerah berupa UU. No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut secara resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 2001. Kedua undang-undang ini kemudian diamandemen menjadi UU No. 32 dan No. 33 tahun 2004.

2. TELAAH TEORI

2.1 Pengertian dan Konsep Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sektor fiskal daerah tersebut dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi. Dalam melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka Pemerintah Daerah harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat.

2.2 Pengertian dan Konsep Ketimpangan

Ketimpangan merupakan suatu fenomena yang terjadi hampir di lapisan negara di dunia, baik itu negara miskin, negara sedang berkembang, maupun negara maju, hanya yang membedakan dari semuanya itu yaitu besaran tingkat ketimpangan tersebut, karenanya ketimpangan itu tidak mungkin dihilangkan namun hanya dapat ditekan hingga batas yang dapat ditoleransi.

Perbedaan kemajuan antar wilayah yang berarti tidak samanya kemampuan untuk bertumbuh yang analog dengan kesenjangan sehingga yang timbul adalah ketidakmerataan.

2.3 Pengukuran Ketimpangan

1. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk secara kumulatif pula. Kurva ini terletak disebuah bujur sangkar yang disisi tegaknya

melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi dasarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata.

2. Indeks Gini

Gini atau lengkapnya Corrado Gini merumuskan suatu ukuran untuk menghitung tingkat ketimpangan pendapatan personal secara agregatif yang diterima diatas tingkat tertentu. Hasil temuannya sering disebut sebagai *gini coefficient* atau indeks gini.

3. Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia yang bekerjasama dengan *Institute of Development Studies* menentukan kriteria tentang penggolongan distribusi pendapatan, apakah dalam keadaan ketimpangan yang parah, sedang, atau ringan.

4. Indeks Williamson

Indeks Williamson ini diperkenalkan oleh Jeffry G Williamson (1965), penghitungan nilai ini didasarkan pada indeks variasi (CV) dan Williamson memodifikasi perhitungan ini dengan menimbanginya dengan proporsi penduduk wilayah.

5. Teori Kuznets

Kuznets (1969) dalam analisisnya mengenai pola sejarah pertumbuhan negara-negara maju, menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, sedangkan pada tahap selanjutnya cenderung membaik.

2.4 Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu dasar yang digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian suatu wilayah adalah dengan menggunakan besaran nilai

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB disajikan atas dasar harga berlaku (sesuai dengan pasar/transaksi pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga pasar pada tahun tertentu).

Perubahan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun penghitungan masih memuat akibat terjadinya inflasi/deflasi sehingga tidak memperlihatkan pertumbuhan atau perubahan PDRB secara riil. Sebaliknya, PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pasar pada tahun tertentu, sehingga perubahan besaran PDRB sudah terlepas dari pengaruh inflasi/deflasi.

2.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dalam dunia nyata, amat sulit untuk mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Kesulitan ini muncul bukan saja karena jenis barang dan jasa yang dihasilkan sangat beragam, tetapi satuan ukurannya pun berbeda. Karena itu angka yang digunakan untuk menaksir perubahan output adalah nilai moneternya (uang) yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan. Sebab, dengan menggunakan harga konstan, pengaruh perubahan harga telah dihilangkan, sehingga sekalipun angka yang muncul adalah nilai uang dari total output barang dan jasa, perubahan nilai PDB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu.

Adapun pertumbuhan ekonomi (dalam konteks daerah) maupun pendapatan per kapita dihitung dengan formulasi berikut ini (Kuncoro 2004) :

$$\text{Pertumbuhan ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Untuk mengukur laju pertumbuhan rata-rata per tahun digunakan rumus sebagai berikut :

$$r = \left(\left(\sqrt[n]{\frac{T_n}{T_o}} - 1 \right) \right) \times 100$$

r = laju pertumbuhan ekonomi rata-rata

n = jumlah tahun (dihitung mulai dengan sampai dengan)

Tn = data tahun sebelumnya

To = data tahun tertentu

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan jenis data yang dipergunakan adalah “*pooling data*” yang dikumpulkan dari berbagai macam sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Utara, buku dan jurnal terkait.

Beberapa sumber data tersebut antara lain :

- Data PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 pada kurun waktu tahun 2004-2008 bersumber dari kantor BPS Propinsi Sumatera Utara.
- Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kurun waktu tahun 2004-2008 bersumber dari kantor BPS Propinsi Sumatera Utara.
- Data Total Penerimaan Daerah (TPD) pada kurun waktu tahun 2004-2008 bersumber dari kantor BPS Propinsi Sumatera Utara.

- Data Pajak Daerah (PD) pada kurun waktu tahun 1994-2008 bersumber dari kantor BPS Propinsi Sumatera Utara.
- Data Tenaga Kerja (TK) pada kurun waktu tahun 2004-2008 bersumber dari kantor BPS Propinsi Sumatera Utara.

3.2 Variabel Penelitian

1. Variabel terikat (*dependent variable*) yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE), Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah dan Ketimpangan Wilayah (KW).
2. Variabel bebas (*independent variable*) antara lain: Desentralisasi fiskal (DF), Tenaga Kerja (TK), Pajak Daerah (PD), dan Aglomerasi (Ag).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka sebagai pengumpulan datanya. Studi pustaka merupakan teknik analisa untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dengan penelitian (M. Nazir, 2000).

3.4 Metode Analisis

Untuk menganalisis skripsi ini, digunakan analisis regresi persamaan simultan (*simultaneous equation regression model*) dengan model Berulang (*Recursive Models*) dan Kuadrat Terkeci. Model akan diregresi menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) dengan data panel, atau disebut PLS (*Panel Least Square*). Dalam skripsi ini digunakan *software* Eviews 6.1 untuk pengolahan data, uji asumsi klasik dan uji statistik.

Model yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah model yang pernah digunakan oleh Gary M. Woller dan Kerk Phillips (1998), Jin dan Zou (2000), dan Jaime Bonet (2006). Dengan mengacu pada teori Simon

Kuznet (1955) dan model berulang (*recursive models*) dan kuadrat terkecil, maka model yang dibentuk adalah:

$$\text{Model Pertumbuhan Ekonomi: } PE = f(DF, PD, TK, AG)$$

$$\text{Model Ketimpangan Wilayah : } KW = f(PE, DF, PD, TK, AG)$$

Model dasar dan diturunkan menjadi model ekonometrika sebagai berikut :

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 DF_{it} + \beta_2 PD_{it} + \beta_3 TK_{it} + \beta_4 Ag_{it} + \mu_{it}$$

$$KW_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \widehat{KW}_{it} + \alpha_2 DF_{it} + \alpha_3 PD_{it} + \alpha_4 TK_{it} + \alpha_5 Ag_{it} + \mu_{it}$$

Dimana:

PE = Pertumbuhan Ekonomi

KW = Ketimpangan Wilayah

DF= Desentralisasi Fiskal

TK= Tenaga kerja

PD= Pajak Daerah

Ag= Aglomerasi

4. HASIL ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian dilakukan studi empirik dengan analisis data yang diperoleh dari sumber data. Analisis yang akan dilakukan adalah pengaruh variabel-variabel yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara. Adapun hasil dari analisis tersebut adalah:

Estimasi Model *Panel Least Square* *Cross-Section Weights and White Cross-Section*

Variabel dependen: Pertumbuhan Ekonomi				Variabel dependen: Ketimpangan Wilayah			
Variabel	Koefisien	std error	Ket	Variabel	koefisien	std error	ket

independen				independen			
DF	0.0092539774201	0.004547	*	PE	0.11827066021	0,034649	*
PD	-0.505841068	0.046426	*	DF	0.0342011626	0,007377	*
TK	1.5310032255	2.581658	*	PD	-0.1966532084	0.083833	*
AG	6.30713830308	0.513080	*	TK	-	7.843957	*
-	-	-	-	AG	12.0104928820	0.735878	*
$R^2 = 0.941962$				$R^2 = 0.941080$			
adjusted $R^2 = 0.939383$				adjusted $R^2 = 0.937770$			
F-stat = 365.1798				F-stat = 284.3040			
* Signifikan pada level 5%							

4.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dari persamaan PE dapat dilihat bahwa variabel-variabel independen (DF, PD, TK, AG) signifikan mempengaruhi variabel dependen, dapat dibuktikan dengan nilai koefisien determinasinya (R^2) yang mencapai 0.941962 yang mengintrepetasikan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota tersebut sebesar 94.1962 persen dan sebesar 5.8038 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar faktor yang menjadi variabel penelitian dalam analisis ini.

1. Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Wagner dalam Mangkusoebroto (1998) mengemukakan pendapat dalam bentuk sebuah hukum yang dikenal dengan Hukum Wagner sebagai berikut: dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Dari hukum wagner tersebut dapat dijelaskan bahwa ada hubungan yang saling tarik-menarik antara pendapatan per kapita masyarakat dengan pengeluaran pemerintah.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dengan asumsi pengeluaran pemerintah daerah diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah, maka dapat disimpulkan bahwa disaat pendapatan per kapita masyarakat meningkat maka akan mendorong penerimaan daerah yang merupakan indikator derajat desentralisasi fiskal suatu daerah meningkat. Maka dapat dideskripsikan juga bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal akan mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik sehingga akan mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi daerah.

Desentralisasi fiskal yang diterapkan pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif mendorong pertumbuhan ekonomi daerah-daerah tersebut semakin meningkat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri memberikan hasil yang baik terhadap masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara.

Kesimpulan tersebut dapat dibuktikan secara empiris, yaitu dapat dilihat dari perhitungan hubungan dari pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi nilai koefisien derajat desentralisasi fiskal pada model ekonometrik pertumbuhan ekonomi sebesar 0.039575 membuktikan bahwa derajat desentralisasi fiskal signifikan dan mempengaruhi secara positif pertumbuhan ekonomi. Artinya setiap peningkatan derajat desentralisasi fiskal sebesar 0,009254 akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen

Dari penjelasan teori dan sudi empiris yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal yang dihitung dari penerimaan daerah signifikan dan berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara.

2. Rasio Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Peacock dan Wiseman (Mangkoesebroto, 1998) mendasarkan teori mereka pada suatu pandangan dimana pemerintah senantiasa akan memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membayar pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman juga berpandangan bahwa masyarakat memiliki tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat memahami besarnya pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Berdasarkan pandangan Peacock dan Wiseman tersebut maka dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan terganggu karena pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah tetap sudah melebihi batas toleransi membayar pajak dari masyarakat. Keadaan ini akan mengganggu penerimaan daerah, yang menjadi indikator peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pendapat Peacock dan Wiseman tentang tingkat toleransi masyarakat dapat juga disebabkan karena menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah seperti yang dijelaskan pada Teori Pigou. Pigou menjelaskan bahwa tingkat kepuasan masyarakat akan kinerja pemerintah dilihat dari barang publik yang dihasilkan oleh pemerintah dimana barang publik harus disediakan sampai tingkat dimana kepuasan marginal sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program-program pemerintah atau untuk menyediakan barang publik.

Dari studi empiris yang dilakukan pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara, mengenai pengaruh rasio (pemungutan) pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemungutan (rasio) pajak daerah akan menurunkan pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara. Hal ini disebabkan karena besarnya pemungutan pajak daerah yang dilakukan pemerintah melebihi batas toleransi membayar

pajak dari masyarakat, dan juga hasil dari program-program pemerintah yang didanai oleh pajak daerah ternyata menurunkan tingkat kepuasan marginal masyarakat. Keadaan ini akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang menurun akibat pungutan (rasio) pajak yang besar dan diikuti dengan tingkat kepuasan masyarakat yang rendah akan menurunkan pendapatan per kapita dari masyarakat tersebut

Kesimpulan ini juga dibuktikan secara empiris, yaitu melalui perhitungan pengaruh rasio pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, pada model ekonometrik pertumbuhan ekonomi, dimana pada model ini nilai koefisien variabel pajak daerah sebesar -0.505841 , yang artinya bahwa rasio pajak daerah signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi pengaruh yang ditimbulkan pajak daerah adalah negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana setiap pemungutan pajak daerah ditingkatkan sebesar 0.505841 maka akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi turun sebesar 1 persen.

Dari penjelasan teori dan studi empiris yang dilakukan pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara dapat disimpulkan bahwa Rasio Pajak Daerah signifikan dan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara.

3. Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dalam Teori Fungsi Produksi Neo-Klasik (Sukirno, 2004), tenaga kerja merupakan salah satu faktor input (faktor input: modal dan tenaga kerja). Yang artinya tenaga kerja menjadi salah satu indikator untuk menentukan produktifitas produksi. Dalam sektor makro tenaga kerja menjadi indikator pertumbuhan ekonomi, karena tenaga kerja akan menghasilkan pendapatan, pendapatan yang dihasilkan setiap individu tenaga kerja disebut pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita akan dikonsumsi, di investasikan, dan digunakan untuk membiayai program-

program pemerintah melalui pungutan pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah.

Dalam Teori Fungsi Produksi Neo-Klasik (Sukirno, 2004), dijelaskan bahwa tenaga kerja akan mempengaruhi pertumbuhan produksi, dimana peningkatan marginal jumlah tenaga kerja akan meningkatkan marginal produksi. Peningkatan marginal produksi akan terus bertambah jika jumlah tenaga kerja terus ditambah hingga mencapai jumlah produksi maksimal.

Kondisi yang terjadi pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa pertumbuhan tenaga kerja dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan jumlah produksi. Kondisi lapangan kerja di Sumatera Utara masih memungkinkan bertambahnya jumlah tenaga kerja. Terutama di daerah-daerah yang maju perindustriannya seperti Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Labuhan Batu, dan Kota Tebing Tinggi.

Kesimpulan ini juga dibuktikan melalui studi empiris, yaitu melalui perhitungan pengaruh jumlah pertumbuhan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dimana nilai koefisien tenaga kerja pada model ekonometrik pertumbuhan ekonomi adalah , yang artinya tenaga kerja signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tetapi memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap penambahan jumlah tenaga kerja sebesar 1.53100 akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen.

Dari studi teori dan empiris tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pertumbuhan tenaga kerja pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara signifikan dan mempengaruhi secara positif pertumbuhan ekonomi daerah pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara.

4. Tingkat Aglomerasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Teori kutub pertumbuhan (Tarigan, 2004) menjelaskan bahwa pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi usaha atau konsentrasi industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar.

Tingkat aglomerasi dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan suatu daerah menjadi pusat pertumbuhan yang ditinjau dari PDRB wilayah tersebut dibandingkan dengan PDRB propinsi. Maka dari teori kutub pertumbuhan (Tarigan, 2004) tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat aglomerasi suatu daerah akan menstimulasi kehidupan daerah tersebut, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi meningkat.

Pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara, tingkat aglomerasinya bernilai positif dan signifikan mendorong masing-masing pertumbuhan ekonomi daerah.

Kesimpulan ini dapat dibuktikan dari studi empiris, melalui perhitungan pengaruh tingkat aglomerasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pada model ekonometrik pertumbuhan ekonomi koefisien tingkat aglomerasi bernilai 6,307138, yang artinya setiap pertumbuhan aglomerasi meningkat sebesar 63,07138 akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut sebesar 1 persen. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat aglomerasi signifikan dan memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara.

4.2 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Wilayah

Dari model regresi di atas, sesuai dengan *recursive model* dapat dilihat bahwa variabel-variabel independen terdiri atas dua yaitu pertumbuhan ekonomi (PE) dan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang terdiri dari variabel-variabel sebagai berikut; derajat desentralisasi fiskal (DF), rasio pajak daerah (PD), tenaga kerja (TK), dan tingkat aglomerasi

daerah (AG). Secara empirik variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen, dapat dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) yang mencapai 0.941080 yang mengintrepetasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan desentralisasi fiskal pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara signifikan mempengaruhi ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara sebesar 94.1080 persen dan sebesar 5.8920 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel-variabel penelitian ini (Gujarati, 2004).

1. Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Wilayah

Teori Kurva U terbalik (*U reverse*) Kuznet (Kuncoro, 1997) yaitu pertumbuhan ekonomi suatu Negara akan mendorong peningkatan ketimpangan antar wilayah dalam Negara tersebut pada tahap awal pembangunan ekonomi, dan akan secara bertahap menurun saat pembangunan ekonomi mencapai titik stabil.

Pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara, masing-masing kabupaten/kota memiliki pertumbuhan ekonomi yang signifikan meningkat seperti yang dapat dibuktikan pada model persamaan pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Tetapi yang menjadi fenomena adalah perkembangan masing-masing daerah di Propinsi Sumatera Utara masih dalam proses menuju posisi *steady state*, sehingga pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing kabupaten/kota juga meningkatkan ketimpangan antar wilayah di Propinsi Sumatera Utara.

Kesimpulan ini dapat dibuktikan dari perhitungan pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap ketimpangan wilayah, yang tertera pada model ekonometrik persamaan ketimpangan wilayah, dimana koefisien pertumbuhan ekonomi bernilai 0.118271, yang artinya setiap pertumbuhan ekonomi daerah meningkat sebesar 0.118271 maka akan mendorong peningkatan ketimpangan wilayah sebesar 1 persen.

Maka dapat disimpulkan dari studi teori dan empiris bahwa pertumbuhan ekonomi daerah signifikan dan berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara.

2. Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Wilayah

Pengeluaran pemerintah daerah diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah, maka disaat pendapatan per kapita masyarakat meningkat maka akan mendorong penerimaan daerah yang merupakan indikator derajat desentralisasi fiskal suatu daerah meningkat. Maka dapat dideskripsikan bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal akan mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik sehingga akan mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

Desentralisasi fiskal yang diterapkan pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif mendorong pendapatan per kapita di daerah-daerah tersebut semakin meningkat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri memberikan hasil yang baik terhadap masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara. Berbeda dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan, derajat desentralisasi fiskal yang meningkat di masing-masing daerah secara bertahap akan mendorong pemerataan antar wilayah. Hal ini dapat dijelaskan dengan teori kutub pertumbuhan (Tarigan, 2004) yaitu semakin banyak kutub pertumbuhan dalam suatu daerah maka akan semakin rata distribusi pendapatan daerah tersebut, walaupun daerah-daerah kumuh (*slum*) akan muncul. Tetapi lambat laun daerah ini akan berkurang seiring dengan munculnya kutub-kutub pertumbuhan ekonomi yang baru.

Melalui studi empiris yang dilakukan pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara, yaitu melalui perhitungan pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah. Dimana pada persamaan model ekonometri ketimpangan wilayah nilai koefisien derajat

desentralisasi fiskal sebesar 0.034201 menginterpretasikan bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal sebesar 0.034201 akan mendorong ketimpangan wilayah meningkat sebesar 1 persen. Hal ini terjadi karena, kutub pertumbuhan yang masih sedikit di Propinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan masih berpusat di Kota Medan, yang mengakibatkan ketimpangan yang cukup jauh dengan daerah-daerah lainnya. Sehingga diharapkan muncul kutub pertumbuhan baru untuk mengurangi tingkat ketimpangan di Propinsi Sumatera Utara

Maka dapat disimpulkan dari studi teori dan empiris bahwa derajat desentralisasi fiskal signifikan dan mempengaruhi secara positif ketimpangan wilayah pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara.

3. Rasio Pajak Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah

Wagner dalam Mangkusoebroto (1998) mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga di dasarkan pula pengamatan di Negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam suatu bentuk hukum, sebagai berikut: dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relative pengeluaran pemerintah juga akan meningkat.

Peningkatan pendapatan per kapita harus dikontrol oleh pemerintah, agar dapat menekan angka ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Peranan pemerintah melalui pemungutan pajak dibutuhkan untuk memperlancar arus distribusi pendapatan ke daerah-daerah yang pertumbuhannya rendah.

Pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara besaran pungutan pajak berhasil menurunkan ketimpangan antar wilayah di Propinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat dibuktikan dari perhitungan pengaruh tingkat rasio (pemungutan) pajak daerah terhadap ketimpangan wilayah, dimana pada model ekonometrik persamaan ketimpangan wilayah

koefisien pajak daerah sebesar -0.196653 menginterpretasikan peningkatan rasio (pemungutan) pajak daerah sebesar 0.196653 akan mendorong ketimpangan wilayah menurun sebesar 1 persen.

Dari studi teori dan empiris tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat rasio (pemungutan) pajak daerah signifikan dan mempengaruhi secara negatif terhadap ketimpangan wilayah pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara.

4. Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan Wilayah

Dalam Teori Fungsi Produksi Neo-Klasik (Sukirno, 2004), tenaga kerja merupakan salah satu faktor input (faktor input: modal dan tenaga kerja). Yang artinya tenaga kerja menjadi salah satu indikator untuk menentukan produktifitas produksi. Dalam sektor makro tenaga kerja menjadi indikator pertumbuhan ekonomi, karena tenaga kerja akan menghasilkan pendapatan, pendapatan yang dihasilkan setiap individu tenaga kerja disebut pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita akan dikonsumsi, di investasikan, dan digunakan untuk membiayai program-program pemerintah melalui pungutan pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah.

Teori Fungsi Produksi Neo-Klasik (Sukirno, 2004), juga menjelaskan bahwa tenaga kerja akan mempengaruhi pertumbuhan produksi, dimana peningkatan marginal jumlah tenaga kerja akan meningkatkan marginal produksi. Peningkatan marginal produksi akan terus bertambah jika jumlah tenaga kerja terus ditambah hingga mencapai jumlah produksi maksimal.

Peningkatan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan per kapita, sehingga akan mendorong penurunan tingkat ketimpangan antar wilayah karena tingkat pendapatan per kapita secara bertahap akan merata di setiap daerah dengan asumsi *full of employment*.

Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan studi empiris, melalui pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap ketimpangan wilayah, dimana pada model ekonometrik koefisien tenaga kerja sebesar -2.878653 menginterpretasikan peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 2.878653 akan mendorong ketimpangan wilayah menurun sebesar 1 persen.

Dari studi teori dan empiris tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja signifikan dan mempengaruhi secara negatif terhadap ketimpangan wilayah pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara.

5. Aglomerasi terhadap Ketimpangan Wilayah

Pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi usaha atau konsentrasi industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar (Tarigan, 2004).

Pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara, perbedaan kemampuan tiap-tiap daerah untuk mampu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan menjadi salah satu fenomena yang menyebabkan ketimpangan wilayah tetap terjadi walaupun aglomerasi berjalan dengan baik pada masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara. Beberapa daerah yang mampu menciptakan kutub-kutub pertumbuhan yang lebih banyak di bandingkan dengan daerah lain memberikan efek stimulus kehidupan ekonomi yang dinamis hanya terjadi di beberapa daerah tersebut, sedangkan di daerah-daerah yang hanya memiliki kutub pertumbuhan yang jumlahnya sedikit, juga mengalami stimulus kehidupan ekonomi tetapi tidak sedinas daerah-daerah yang memiliki kutub pertumbuhan yang lebih banyak. Aglomerasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang sama-sama meningkat tetapi tidak merata besarannya akan menumbuhkan efek disparitas antar wilayah.

Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan studi empiris, melalui pengaruh tingkat aglomerasi terhadap ketimpangan wilayah, dimana pada model ekonometrik persamaan ketimpangan wilayah koefisien aglomerasi sebesar 12.01049 menginterpretasikan peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 12.01049 akan mendorong ketimpangan wilayah meningkat sebesar 1 persen.

Dari studi teori dan empiris tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat aglomerasi signifikan dan mempengaruhi secara positif terhadap ketimpangan wilayah pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dengan penggunaan data panel, regresi persamaan linear berganda dengan menggunakan metode PLS (*Panel Least Square*) dan dengan menggunakan *Cross-Section Weight* dan *White Cross-Section* pada pertumbuhan ekonomi, uji asumsi klasik dan uji statistik. Maka pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi di 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara periode penelitian 2004-2008, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertumbuhan ekonomi signifikan dan positif dipengaruhi oleh derajat desentralisasi fiskal, tenaga kerja, dan tingkat aglomerasi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan ketiga variabel tersebut, yaitu semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal, tenaga kerja, dan aglomerasi, maka semakin mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Sebaliknya pajak daerah memiliki hubungan yang signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana semakin tinggi pajak daerah, maka tingkat pertumbuhan ekonomi akan semakin menurun. Maka dari kesimpulan tersebut dapat dibuktikan bahwa hipotesis awal peneliti diterima. Dari hal-hal tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal di Propinsi Sumatera Utara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, positif maupun negatif.

2. Ketimpangan wilayah yang terjadi di Propinsi Sumatera Utara, dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan wilayah. Hal ini disebabkan oleh berbedanya kemampuan daerah-daerah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama daerah ibukota propinsi yang jauh meninggalkan daerah-daerah lainnya. Disparitas pertumbuhan ekonomi antar daerah ini akan mendorong peningkatan ketimpangan wilayah. Desentralisasi fiskal dan aglomerasi memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan wilayah. Untuk desentralisasi fiskal, semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal akan mendorong peningkatan ketimpangan wilayah. Ini disebabkan oleh adanya daerah/wilayah yang jauh lebih maju dibanding daerah lain, seperti Kota Medan dibanding daerah lainnya. Sementara untuk aglomerasi juga mempunyai sebab yang sama dengan desentralisasi fiskal, yaitu proses pengkotaan yang bervariasi di tiap daerah akan mendorong semakin tingginya ketimpangan wilayah. Sedangkan rasio pajak daerah dan tenaga kerja yang memiliki hubungan yang signifikan dan negatif, akan mendorong ketimpangan semakin rendah. Artinya peningkatan rasio pajak daerah dan penyerapan tenaga kerja, akan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Dari kesimpulan tersebut maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti diterima. Maka dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal signifikan mempengaruhi ketimpangan wilayah, baik hubungan secara positif maupun negatif.

5.2 Saran

Saran yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara harus memaksimalkan peranan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya.
2. Pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara harus meningkatkan kemampuan tiap daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal secara merata, agar mengurangi tingkat ketimpangan antar wilayah.
3. Pengendalian rasio pajak daerah dan peningkatan daya serap tenaga kerja di setiap kabupaten/kota harus dioptimalkan oleh pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara, agar dapat menurunkan tingkat ketimpangan wilayah di Propinsi Sumatera Utara
4. Untuk penelitian yang akan meneliti tentang thema dan masalah yang sama maupun menyerupai agar menambah jumlah variabel penelitian agar dapat memberikan hasil analisis yang lebih riil.

6. REFERENSI (DAFTAR PUSTAKA)

[Anonim]. 2000. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.

2000. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta

2006. *RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2004-2009*. Jakarta: Sinar Grafika.

UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004, Jakarta: Cemerlang.

Boediono. 2002. *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka Pelaksanaan Azas Desentralisasi Fiskal*, disampaikan pada *Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional Tahun 2002*. Jakarta, 11 Februari 2002.

Davey, K. 1989. *Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, dalam* Devas (editor), *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UI-Press, Jakarta.

Damanhuri, D.S. 1999. *PJP-I, Krisis Ekonomi dan Masa Depan Pembangunan dalam Pilar-pilar Reformasi Ekonomi-Politik, Upaya Memahami Krisis Ekonomi dan Menyongsong Indonesia Baru*. CIDES dan Pustaka Hidayah, Jakarta.

1999. *Krisis Besar atau Turbulensi Ekonomi dalam Pilar-pilar Reformasi Ekonomi-Politik, Upaya Memahami Krisis Ekonomi dan Menyongsong Indonesia Baru*. CIDES dan Pustaka Hidayah, Jakarta.

Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga, Jakarta.

Gujarati, D. 1995. *Ekonometrika Dasar*, dalam Sumarna (penerjemah). Erlangga, Jakarta.

- Hidayat, S. 2004. *Desentralisasi: Tinjauan Literatur Tentang Konsep Dasar, Pengalaman Negara Lain, dan Dinamika Kebijakan di Indonesia*, dalam Susanto (penyunting), *Otonomi Daerah: Teori dan Kenyataan Empiris*. PPE-LIPI, Jakarta.
- Jhingan, M.L. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, dalam Guritno (penerjemah). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro, M. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP-APN-YKPN, Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga.
- Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, T. 2004. *Disparitas Pembangunan Wilayah Pesisir Utara dan Selatan Jawa Barat (Studi Kasus Di Kabupaten Karawang Subang – Garut Ciamis)* [Tesis]. Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Robiyanto, F dan Mugihardjo. 2007. *Ekonomi Pembangunan : Teori dan Kebijakan*. Penerbit Studi Nusa, Semarang.
- Samuelson, Paul A, dan Nordhaus. 1994. *Pembangunan Ekonomi* (edisi terjemahan). Edisi ke-12. Jakarta: Erlangga.
- Sidik, M. 2002. *Kebijakan, Implementasi, dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, dalam seminar nasional *Menciptakan Good Governance demi Mendukung Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal*. Yogyakarta, 20 April 2002.
- Suhartono, H. 2005. *Signifikansi Peran Transfer Fiskal dalam Mengurangi Kesenjangan Antar Daerah di Wilayah Jawa Bagian Barat* [Tesis]. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, FE-UI.

Sya'dullah, M. 1999. *Dampak Pengalokasian DIP dan Inpres terhadap Distribusi Pendapatan*, dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. JEP VII (1). PEP – LIPI.

Tambunan, T.T.H. 2003. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Permasalahan Penting*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tarigan, Robinson 2004. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Todaro, Michael P and Stephen C Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga.